

Literature Review: Manajemen Strategis dalam Peningkatan Kinerja Layanan Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan di BKHIT Maluku

Andri Maulana Yusup^{1*}, Alrino Ode Masimu², Rustam Ode Nur³, dan Safrina Marajabessy⁴

^{1,2,3,4} Universitas Khairun, Indonesia

Journal of Economics and Management Sciences is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



ARTICLE HISTORY

Received: 16 May 26

Final Revision: 26 June 26

Accepted: 13 July 26

Online Publication: 30 September 26

KEYWORDS

Strategic Management, Service Performance Improvement, Animal, Fish, and Plant Quarantine, BKHIT Maluku, Public Service Quality

KATA KUNCI

Manajemen Strategis, Peningkatan Kinerja Layanan, Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, BKHIT Maluku, Kualitas Pelayanan Publik

CORRESPONDING AUTHOR

andri.maulanayusup8@gmail.com

DOI

10.37034/jems.v8i4.472

ABSTRACT

The Animal, Fish, and Plant Quarantine Center (BKHIT) Maluku plays an important role in preserving biodiversity and supporting agricultural commodity trade in Maluku Province. This article examines the implementation of strategic management at BKHIT Maluku through a systematic literature review from 2020 to 2026. Data were collected from scientific journals, policy documents, and official reports through four stages, namely identification and screening of relevant sources in academic databases; selection of materials related to strategic management in public organizations and island governance; thematic analysis to discover recurring patterns, strategies, and trends; and development of an analytical framework based on strategic management theories including Resource Based View, Stakeholder Theory, Balanced Scorecard, Dynamic Capabilities, and Public Service Motivation adapted to BKHIT Maluku's conditions. The results indicate that BKHIT Maluku faces a complex strategic situation with high biodiversity as a strength, limited budget and infrastructure as weaknesses, digital transformation programs as opportunities, and climate change as threats. The proposed strategies include digital technology utilization, human resource development through blended learning, strengthening community-based surveillance, and cross-sectoral collaboration to achieve organizational objectives and overcome archipelago governance challenges.

ABSTRAK

Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku berperan penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan mendukung perdagangan komoditas pertanian di Provinsi Maluku. Artikel ini mengkaji penerapan manajemen strategis di BKHIT Maluku melalui tinjauan literatur sistematis dari tahun 2020 hingga 2026. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, dan laporan resmi melalui empat tahap, yakni identifikasi dan penyaringan sumber relevan di basis data akademik; seleksi materi terkait manajemen strategis organisasi publik dan tata kelola wilayah kepulauan; analisis tematik untuk menemukan pola, strategi, dan tren yang berulang; serta penyusunan kerangka analisis berdasarkan teori-teori manajemen strategis seperti Resource Based View, Teori *Stakeholder*, *Balanced Scorecard*, Kapabilitas Dinamis, dan Motivasi Pelayanan Publik yang disesuaikan dengan kondisi BKHIT Maluku. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa BKHIT Maluku menghadapi situasi strategis yang kompleks dengan keanekaragaman hayati tinggi sebagai kekuatan, keterbatasan anggaran dan infrastruktur sebagai kelemahan, program transformasi digital sebagai peluang, serta perubahan iklim sebagai ancaman. Strategi yang diusulkan meliputi pemanfaatan teknologi digital, pengembangan sumber daya manusia melalui *blended learning*, penguatan pengawasan berbasis masyarakat, dan kerja sama lintas sektor guna mencapai tujuan organisasi dan mengatasi tantangan tata kelola wilayah kepulauan.

1. Pendahuluan

BKHIT Maluku merupakan unit teknis di bawah Badan Karantina Indonesia yang bertanggung jawab mengawasi lalu lintas hewan, ikan, dan tumbuhan di Kepulauan Maluku. Kepulauan Maluku terdiri dari ratusan pulau dengan infrastruktur terbatas membawa tantangan tersendiri dalam pelaksanaan kebijakan karantina. Seiring dengan reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan, BKHIT Maluku dituntut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan.

Manajemen strategis menjadi alat penting untuk mengarahkan organisasi dalam menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar. Manajemen strategis adalah seni dan ilmu merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi keputusan yang melibatkan berbagai fungsi organisasi untuk mencapai tujuan [1]. Penerapan manajemen strategis di organisasi publik, khususnya di wilayah kepulauan, memerlukan pendekatan yang berbeda dengan sektor swasta karena harus mempertimbangkan kepentingan banyak *Stakeholder*, akuntabilitas politik, dan keterbatasan sumber daya [2].

Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia 2025–2029 menetapkan arah kebijakan pembangunan wilayah Maluku yang mencakup: (1) pengembangan laboratorium pangan; (2) revitalisasi laboratorium; (3) pengembangan dan pembangunan instalasi karantina modern milik pemerintah; (4) membangun Modeling Twint Port; (5) pembimbingan teknis persyaratan karantina ekspor bagi UMKM; serta (6) mengembangkan laboratorium keamanan pangan [3]. Arah kebijakan ini menunjukkan komitmen organisasi untuk meningkatkan kinerja layanan di wilayah Maluku melalui pendekatan manajemen strategis yang terencana.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam artikel ini adalah:

- a) Bagaimana perumusan strategi manajemen di BKHIT Maluku berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal?
- b) Bagaimana implementasi manajemen strategis di BKHIT Maluku dapat meningkatkan kinerja layanan karantina?
- c) Bagaimana evaluasi dan pengendalian strategi dilakukan untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi?

Artikel ini bertujuan menganalisis implementasi manajemen strategis di BKHIT Maluku berdasarkan tinjauan literatur terbaru (2020-2026), meliputi perumusan strategi, penerapan, evaluasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan manajemen strategis.

2. Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode tinjauan literatur dengan pendekatan sistematis [1]. Data diperoleh dari jurnal ilmiah pada periode 2020-2026 terkait manajemen strategis organisasi publik [2], [4]. Proses pengumpulan data meliputi identifikasi sumber dari tahun 2020-2026, seleksi materi yang relevan [5], analisis tematik untuk mengenali pola dan tren [6], serta penyusunan kerangka analisis berdasarkan teori manajemen strategis klasik yang dikaitkan dengan konteks BKHIT Maluku [7]. Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sistematis pada basis data akademik terkemuka, meliputi Google Scholar, Scopus, dan portal jurnal nasional seperti SINTA dan Garuda [6]. Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran antara lain: “manajemen strategis organisasi publik,” “strategic management public sector,” “karantina pertanian wilayah kepulauan,” “island governance,” dan “BKHIT Maluku.” Cakupan waktu pencarian dibatasi pada periode 2020 hingga 2026 guna memastikan relevansi dan kemutakhiran data [5].

Proses pengumpulan data meliputi empat tahapan: (1) identifikasi sumber, yakni menelusuri jurnal ilmiah,

dokumen kebijakan resmi seperti Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia [3], dan laporan lembaga internasional yang relevan; (2) seleksi materi yang relevan berdasarkan kriteria inklusi, yaitu dokumen yang membahas manajemen strategis, kinerja organisasi publik, atau tata kelola wilayah kepulauan [1], [2]; (3) analisis tematik untuk mengenali pola, strategi, dan tren yang berulang dalam literatur [8]; serta (4) penyusunan kerangka analisis berdasarkan teori-teori manajemen strategis klasik yang dikaitkan dengan konteks operasional BKHIT Maluku [7], [9]. Kriteria eksklusi mencakup sumber yang tidak relevan dengan konteks organisasi publik atau yang diterbitkan sebelum tahun 2020, kecuali untuk sumber teori dasar yang bersifat fondasional [10].

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil analisis menunjukkan bahwa BKHIT Maluku menghadapi tantangan strategis yang kompleks akibat karakteristik geografis Kepulauan Maluku. Analisis SWOT mengidentifikasi kekuatan seperti keanekaragaman hayati tinggi sebagai objek pengawasan karantina [11], personel dengan pengetahuan lokal tentang ekosistem kepulauan [10], dan infrastruktur karantina di lokasi strategis [3]. Kelemahan yang ditemukan meliputi keterbatasan anggaran operasional, kekurangan tenaga teknis karantina [12], infrastruktur transportasi dan komunikasi yang belum merata [13], serta ketergantungan pada proses manual [14]. Peluang eksternal meliputi program transformasi digital pemerintah untuk modernisasi layanan [15], pemanfaatan teknologi *remote sensing* untuk deteksi dini hama dan penyakit [16], kerja sama bilateral dan multilateral dalam pengendalian hama lintas batas, serta pertumbuhan perdagangan komoditas pertanian, perikanan, dan peternakan [10]. Ancaman yang dihadapi antara lain perubahan iklim yang memicu munculnya hama dan penyakit baru [17], perdagangan ilegal hewan, ikan, dan tumbuhan [18], serta resistensi masyarakat terhadap regulasi karantina [19].

Temuan analisis lingkungan strategis dapat dijelaskan melalui Teori *Resource Based View* (RBV). Keunggulan kompetitif organisasi berasal dari sumber daya yang memenuhi kriteria VRIN (*Valuable, Rare, Inimitable, Non-substitutable*) [7]. Pada BKHIT Maluku, keanekaragaman hayati tinggi, pengetahuan lokal personel, dan jejaring dengan komunitas nelayan serta petani merupakan sumber daya yang memenuhi kriteria VRIN dan menjadi kekuatan strategis yang unik. Sebaliknya, RBV mengidentifikasi kelemahan sebagai sumber daya yang tidak memenuhi kriteria VRIN, seperti anggaran terbatas, kekurangan tenaga teknis, dan infrastruktur yang belum merata, yang menghambat keunggulan kompetitif.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang menekankan pentingnya aliansi lintas sektor untuk mengatasi keterbatasan sumber daya di organisasi

publik [8]. Teori Kapabilitas Dinamis menekankan pentingnya kemampuan *sensing* untuk mendeteksi peluang dan ancaman [20]. EBSCO menambahkan bahwa kemampuan dinamis memungkinkan organisasi beradaptasi terhadap perubahan lingkungan yang cepat, membedakannya dari kemampuan operasional biasa [21]. BKHIT Maluku telah menunjukkan kemampuan *sensing* melalui identifikasi peluang transformasi digital dan teknologi *remote sensing*, serta deteksi ancaman perubahan iklim dan perdagangan ilegal sebagai dasar perumusan strategi adaptif.

Berdasarkan pemetaan SWOT, tinjauan literatur mengidentifikasi empat strategi utama untuk BKHIT Maluku. Strategi SO (*Strengths-Opportunities*) meliputi integrasi teknologi digital dengan kekuatan lokal melalui pengembangan sistem *e-quarantine* [22], basis data spesies endemik [11], dan penguatan kerja sama internasional dalam pengendalian hama dan penyakit [23]. Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*) mencakup pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan daring dan *blended learning* [24], serta optimalisasi anggaran melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah [25]. Strategi ST (*Strengths-Threats*) fokus pada penguatan sistem pengawasan berbasis masyarakat [26] dan pengembangan protokol karantina adaptif terhadap perubahan iklim [27]. Strategi WT (*Weaknesses-Threats*) meliputi konsolidasi sumber daya di lokasi strategis serta penguatan regulasi dan penegakan hukum untuk mengatasi perdagangan ilegal [26], [27].

Perumusan strategi ini menggunakan kerangka analisis SWOT, yang merupakan salah satu dari lima komponen utama manajemen strategis [4]. Analisis lingkungan eksternal dan internal menjadi tahap awal yang fundamental sebelum merumuskan visi, misi, dan tujuan strategis. Dalam konteks organisasi publik, perumusan strategi harus mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan, bukan sekadar keuntungan finansial [2]. Hal ini sejalan dengan Teori *Stakeholder* yang menyatakan bahwa organisasi harus menciptakan nilai bagi semua pihak yang terpengaruh oleh kegiatannya [9]. Dalam konteks BKHIT Maluku, pihak-pihak tersebut meliputi masyarakat sebagai pengguna layanan, pemerintah daerah sebagai mitra kerja, pelaku usaha sebagai mitra bisnis, serta negara sebagai pemilik organisasi. Keseimbangan antara berbagai kepentingan *Stakeholder* akan memperkuat hubungan dan meningkatkan reputasi organisasi secara keseluruhan [28].

Strategi SO yang mengintegrasikan teknologi digital dengan kekuatan lokal mencerminkan penerapan kapabilitas dinamis dalam tahap *seizing*, di mana organisasi mengambil peluang melalui tindakan strategis [29]. Pengembangan sistem *e-quarantine* dan basis data spesies endemik merupakan inisiatif yang memanfaatkan kekuatan internal untuk merespons

peluang eksternal. Strategi WO yang berfokus pada pengembangan SDM melalui *blended learning* [24] yang didukung oleh Teori Motivasi Pelayanan Publik (*Public Service Motivation/PSM* [30] yang menjelaskan bahwa pegawai negeri termotivasi oleh keinginan untuk melayani masyarakat, dan motivasi ini dapat diperkuat melalui pelatihan serta penyediaan sumber daya yang memadai [31]. Program *blended learning* tidak hanya meningkatkan kompetensi teknis, tetapi juga memperkuat semangat pelayanan petugas karantina yang bertugas di wilayah terpencil.

Terdapat empat tantangan utama dalam implementasi manajemen strategis di BKHIT Maluku. Tantangan tersebut meliputi kebutuhan akan kepemimpinan strategis yang memadukan keahlian teknis dan manajerial dengan gaya transformasional [5]; struktur organisasi dan koordinasi yang tersebar di wilayah kepulauan, sehingga diperlukan mekanisme koordinasi yang efektif dan pemanfaatan teknologi komunikasi [26]; pengembangan SDM melalui program sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan [12]; serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung transformasi digital, termasuk sistem *e-quarantine* dan aplikasi *mobile* [5], [14].

Implementasi manajemen strategis di BKHIT Maluku menghadapi tantangan khusus yang tidak dijumpai di UPT Karantina di provinsi kepulauan lain. Teori Kapabilitas Dinamis [20] menjelaskan bahwa organisasi harus memiliki kemampuan *transforming*, yaitu mengonfigurasi ulang aset organisasi untuk merespons perubahan lingkungan. Menurut penjelasan dari EBSCO [21], kapabilitas dinamis membedakan antara kemampuan operasional (*ordinary capabilities*) yang berkaitan dengan aktivitas rutin saat ini dan kemampuan dinamis yang bersifat unik bagi setiap organisasi dan memungkinkan adaptasi terhadap perubahan. Manajerial dalam mendeteksi peluang, mengalokasikan sumber daya, dan mentransformasi aset menjadi elemen esensial untuk mencapai ketiga kapabilitas dinamis tersebut.

Dalam konteks BKHIT Maluku, *transforming* diwujudkan melalui pengaturan ulang struktur organisasi dan koordinasi yang tersebar di wilayah kepulauan. Penelitian sebelumnya mengembangkan *Island Sub-district Governance Model* (ISGov-Model) yang menekankan perlunya desentralisasi asimetris berbasis geografis kepulauan [31]. Model ini memberikan wewenang yang lebih luas, kapasitas operasional yang lebih dinamis, dan diskresi yang memadai kepada pemerintahan kecamatan pulau untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penerapan model ini pada BKHIT Maluku berarti pemberian kewenangan operasional yang lebih besar pada satuan pelayanan karantina di tingkat pulau, dengan tetap menjaga koordinasi pusat. Transformasi layanan publik di wilayah kepulauan melalui teknologi informasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, meskipun

keterbatasan infrastruktur dan literasi digital tetap menjadi tantangan [32]. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam implementasi sistem *e-quarantine* dan aplikasi *mobile* di BKHIT Maluku, di mana diperlukan pendekatan yang memungkinkan layanan tetap berjalan meskipun konektivitas terbatas. Teori Motivasi Pelayanan Publik (PSM) juga menjadi relevan dalam konteks implementasi [30]. Kinerja tinggi di kalangan aparatur sipil tidak hanya dipengaruhi oleh motivasi intrinsik, tetapi juga oleh pelatihan dan sumber daya yang tersedia [31]. Program sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan menjadi mekanisme penting untuk mempertahankan dan meningkatkan PSM di kalangan petugas karantina yang menghadapi tantangan geografis dan infrastruktur [12].

Evaluasi kinerja BKHIT Maluku harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah kepulauan. Indikator evaluasi yang relevan meliputi cakupan layanan geografis, waktu respons terhadap permohonan layanan karantina, indeks kepuasan masyarakat dan pelaku usaha terhadap layanan, efektivitas pengendalian hama dan penyakit, serta efisiensi anggaran. Evaluasi kinerja di sektor publik memang lebih kompleks dibandingkan sektor swasta karena harus mempertimbangkan variabel yang bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol. Teori *Balanced Scorecard* (BSC) memberikan kerangka evaluasi yang komprehensif untuk organisasi publik [33]. BSC dalam sektor publik mengukur efektivitas operasional melalui empat perspektif yaitu keuangan/fidusia, pelanggan, proses internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan [34]. Perspektif keuangan dalam sektor swasta diganti dengan perspektif fidusia yang mencerminkan tujuan dari pembayar pajak atau donor.

Dalam konteks BKHIT Maluku, perspektif fidusia diwujudkan melalui efektivitas penggunaan anggaran publik untuk perlindungan keanekaragaman hayati, perspektif pelanggan melalui kepuasan masyarakat dan pelaku usaha, perspektif proses internal melalui efisiensi proses karantina termasuk sistem *e-quarantine* [22], serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan melalui pengembangan kompetensi petugas melalui program sertifikasi dan pelatihan berkelanjutan [12]. BSC yang disesuaikan dengan konteks BKHIT Maluku terbukti efektif sebagai alat evaluasi strategi [10]. Hal ini sejalan dengan pemikiran yang menegaskan bahwa organisasi publik dievaluasi berdasarkan kemampuannya untuk memenuhi misi publik, memberikan pelayanan, serta mematuhi regulasi yang berlaku [35]. Keberhasilan BKHIT Maluku tidak diukur dari keuntungan finansial, melainkan dari sejauh mana organisasi mampu memenuhi misi sosialnya dalam melindungi keanekaragaman hayati dan memfasilitasi perdagangan komoditas pertanian dan perikanan.

Organisasi publik di wilayah kepulauan, termasuk BKHIT Maluku, menghadapi tantangan spesifik dalam implementasi manajemen strategis. Tantangan tersebut meliputi wilayah geografis yang terpecah sehingga menyulitkan koordinasi dan pengawasan lintas pulau [10], [36]; infrastruktur transportasi dan komunikasi yang minim sehingga memperlambat respons dan membatasi mobilitas petugas [13]; biaya operasional tinggi yang menuntut efisiensi anggaran [10]; kesulitan mendapatkan tenaga ahli yang menyebabkan kekurangan SDM teknis karantina [12]; serta keterbatasan literasi digital masyarakat yang menghambat transformasi digital layanan [32].

Tantangan khusus wilayah kepulauan ini dapat dijelaskan melalui Teori Kapabilitas Dinamis [20] yang menekankan bahwa organisasi harus terus beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Dinamika perubahan iklim, perkembangan teknologi digital, dan fluktuasi kebijakan perdagangan menuntut BKHIT Maluku untuk memiliki kapabilitas dinamis yang kuat. Penelitian sebelumnya mengembangkan *Island Sub-district Governance Model* (ISGov-Model) yang menjadi solusi bagi tantangan tata kelola di wilayah kepulauan [31]. Model ini menekankan desentralisasi asimetris berbasis geografis kepulauan, di mana pemerintahan di tingkat kecamatan pulau diberikan wewenang lebih luas dan diskresi yang memadai. Transformasi layanan publik di wilayah kepulauan melalui teknologi informasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, namun keterbatasan infrastruktur dan literasi digital menjadi tantangan tersendiri [32]. Temuan ini relevan dengan implementasi sistem *e-quarantine* di BKHIT Maluku, di mana diperlukan pendekatan *offline-online* yang memungkinkan layanan tetap berjalan meskipun konektivitas terbatas.

Literatur yang relevan dengan topik bahasan, meliputi penelitian empiris, buku teks, dan dokumen kebijakan, disajikan dalam Tabel 1. Hasil identifikasi penelitian terdahulu menunjukkan adanya kesenjangan literatur yang signifikan. Meskipun terdapat banyak penelitian tentang manajemen strategis di sektor publik dan tata kelola wilayah kepulauan secara terpisah, penelitian yang secara spesifik mengintegrasikan kedua konteks tersebut dalam konteks layanan karantina masih terbatas. Beberapa penelitian sebelumnya memberikan kontribusi penting tentang tata kelola kepulauan, namun belum membahas aspek karantina secara spesifik [31], [32]. Sementara itu, konsep manajemen strategis organisasi publik belum mengkontekstualisasikan teori tersebut pada kondisi geografis kepulauan [2], [4].

Tabel 1. Literatur yang Relevan dengan Topik Bahasan

Peneliti	Tahun	Judul/Jurnal	Temuan Utama
Uang, et al. [32]	2025	Transformation of Public Services in the Island Regions: Improving Community Participation through Information Technology (Indigenous Public Administration Proceedings)	Menunjukkan bahwa transformasi layanan publik di wilayah kepulauan melalui teknologi informasi meningkatkan partisipasi masyarakat, meskipun keterbatasan infrastruktur dan literasi digital tetap menjadi tantangan
Tuncay, M. [8]	2015	SWOT Analysis in Strategic Management and a Sample Application in Public (MPRA Paper, No. 67213)	Menganalisis respons strategis organisasi publik terhadap keterbatasan sumber daya menggunakan analisis SWOT, dengan penekanan pada pentingnya aliansi lintas sektor
Madubun, J [31]	2023	Public Services in Island Sub-districts: Towards Geography-based Governance (Public Administration and Development)	Mengembangkan <i>Island Sub-district Governance Model</i> (ISGov-Model) yang mendorong desentralisasi asimetris berbasis geografis kepulauan sebagai solusi layanan publik di daerah terpencil
Prabowo, et al. [13]	2022	Development of Local Government Capacity in Managing Border Area: A Case Study of Sebatik Island (Croatian International Relations Review)	Menganalisis strategi pengembangan kapasitas SDM pemerintah daerah di wilayah kepulauan terpencil, relevan untuk penguatan pengawasan dan pelatihan petugas karantina
Hardjati, dkk [27]	2021	Manajemen Strategi Sektor Publik (Indomedia Pustaka)	Konsep manajemen strategi sektor publik meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi strategi.
Samir, et al. [17]	2026	Climate Shocks and Agricultural Output Dynamics in Indonesia (Discover Sustainability)	Menyusun kerangka adaptasi pertanian Indonesia terhadap perubahan iklim, menegaskan perlunya protokol karantina yang fleksibel dan sistem peringatan dini terhadap hama dan penyakit baru
David et al. [1]	2020	Strategic Management: A Competitive Advantage Approach (Pearson Education)	Menyajikan teori klasik manajemen strategis dengan pendekatan keunggulan kompetitif yang menjadi dasar analisis organisasi publik
Bryson, J. M. [2]	2018	Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations (Jossey-Bass)	Memberikan kerangka perencanaan strategis bagi organisasi publik dengan fokus pada analisis pemangku kepentingan
Barney, J. B. & Hesterly, W. S. [7]	2020	Strategic Management and Competitive Advantage (Pearson)	Menjelaskan teori Resource Based View sebagai dasar dalam mengidentifikasi kekuatan strategis organisasi
Thompson, et al. [4]	2020	Crafting and Executing Strategy (McGraw-Hill)	Menguraikan lima komponen manajemen strategis yang menjadi kerangka analisis implementasi strategi
Badan Karantina Indonesia [3]	2025	Rancangan Renstra Badan Karantina Indonesia 2025-2029	Penguatan kelembagaan dan integrasi teknologi dalam modernisasi karantina.

Teori *Resource Based View* dan Teori Kapabilitas Dinamis menjadi fondasi teoretis yang paling sering digunakan dalam literatur yang relevan [7], [20]. RBV digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal organisasi, sementara kapabilitas dinamis menjelaskan bagaimana organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal. Kedua teori ini menjadi kerangka yang komprehensif untuk menganalisis BKHIT Maluku yang menghadapi tantangan internal berupa keterbatasan sumber daya dan tantangan eksternal berupa perubahan iklim serta dinamika perdagangan.

Teori *Stakeholder* dan Teori Motivasi Pelayanan Publik (PSM) memberikan perspektif penting tentang aspek manusiawi dalam implementasi strategi [9], [30]. Teori *Stakeholder* menjelaskan perlunya keseimbangan kepentingan berbagai pihak, sementara PSM menjelaskan motivasi intrinsik pegawai negeri yang menjadi fondasi kinerja organisasi publik. Kedua teori ini menjadi relevan mengingat BKHIT Maluku harus melayani masyarakat di wilayah terpencil dengan sumber daya manusia yang terbatas.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, peningkatan kinerja BKHIT Maluku memerlukan sinergi tiga pilar strategis, yaitu transformasi digital berbasis *e-quarantine*, pengembangan SDM melalui *blended learning* dan *community-based surveillance*, serta kolaborasi lintas sektoral dengan pemerintah daerah dan mitra internasional. Ketiga pilar ini didukung oleh Rencana Strategis Badan Karantina Indonesia 2025–2029 untuk mewujudkan visi perlindungan sumber daya hayati secara berkelanjutan. Sebagai tindak lanjut, rekomendasi pertama adalah menyusun *roadmap* transformasi digital berbasis aplikasi *mobile* bersistem *offline-online* guna mengatasi keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil. Selanjutnya, implementasi model pembelajaran campuran untuk pelatihan personel diterapkan demi meningkatkan kompetensi teknis sekaligus memperkuat motivasi pelayanan publik. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi juga difokuskan pada pengembangan kapasitas serta riset karantina. Untuk mengukur keberhasilan, sistem

Balanced Scorecard yang disesuaikan dengan konteks kepulauan digunakan sebagai alat evaluasi kinerja yang komprehensif. Akhirnya, pembangunan sistem peringatan dini berbasis data lingkungan dan intelijen perdagangan diupayakan untuk mempercepat respons terhadap ancaman hama serta penyakit baru akibat perubahan iklim.

Daftar Rujukan

- [1] David, F. R., David, F. R., & David, M. E. (2020). *Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases* (17th ed.). Pearson Education.
- [2] Bryson, J. M. (2018). *Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement* (5th ed.). Jossey-Bass.
- [3] Badan Karantina Indonesia. (2025). *Rancangan rencana strategis Badan Karantina Indonesia 2025–2029*. Retrieved from <https://karantinaindonesia.go.id/akuntabilitas-kinerja>
- [4] Thompson, A. A., Peteraf, M. A., Gamble, J. E., & Strickland, A. J. (2020). *Crafting and Executing Strategy: The Quest for Competitive Advantage* (22nd ed.). McGraw-Hill Education.
- [5] Sikam, S. (2026). Penguatan sistem karantina nasional berbasis digital dan traceability dalam mendukung ketahanan pangan dan daya saing ekspor Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4(2), 272–293. <https://doi.org/10.62383/risoma.v4i2.1601>
- [6] Goh, L. (2022). The digital transformation of agriculture in Indonesia. Brookings Institution. Retrieved from <https://www.brookings.edu/articles/the-digital-transformation-of-agriculture-in-indonesia/>
- [7] Barney, J. B., & Hesterly, W. S. (2020). *Strategic Management and Competitive Advantage: Concepts and Cases* (6th ed.). Pearson Education.
- [8] Tuncay, M. (2015). SWOT Analysis in Strategic Management and a Sample Application in Public. *MPRA Paper*, 67213
- [9] Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman Publishing.
- [10] Sarfan, R., Matatula, M., Sangadji, I., Tulalessy, A., & Sulaiman, K. (2024). Prosedur Layanan Karantina Hewan oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas 1 Ambon Pada Wilayah Kerja Bandara Pattimura Ambon. *MAANU: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 29–35. <https://doi.org/10.30598/maanuv2i2p29-35>
- [11] The Global Environment Facility (GEF). (2019). *A race against time: combatting the illegal trade of endangered species in Indonesia*. Retrieved from <https://www.thegef.org/news/race-against-time-combatting-illegal-trade-endangered-species-indonesia>
- [12] Kartikawati, E. (2014). Formulasi strategi komunikasi karantina pertanian menggunakan audit komunikasi. *Jurnal Masyarakat Telematika dan Informasi*, 5(2), 127–152.
- [13] Prabowo, H., Indrayani, E., Rusfiana, Y., & Sinaga, O. (2022). Development of local government capacity in managing Indonesia-Malaysia border area (Study on Sebatik Island). *Croatian International Relations Review*, 28(90), 117–134.
- [14] Kedutaan Besar Republik Indonesia. (2025). *FAQ All Indonesia: Satu aplikasi untuk semua layanan kedatangan internasional*. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Retrieved from https://id.china-embassy.gov.cn/chn/lswf/zytz_0/202508/P020250829657093293002.pdf
- [15] Tech for Good Institute. (2025). *Digital Transformation: Building Future-Ready Government and Policy*. Retrieved from <https://techforgoodinstitute.org/insights/country-spotlights/digital-transformation-building-future-ready-government-and-policy/>
- [16] Apan, A., Held, A., Phin, S., & Markley, J. (2004). Detecting Sugarcane 'Orange Rust' Disease Using EO-1 Hyperion Hyperspectral Imagery. *International Journal of Remote Sensing*, 25(2), 489–498. <https://doi.org/10.1080/01431160310001618031>
- [17] Samir, S., Baja, S., Utami, R., & Walyandra, Z. Z. (2026). Climate shocks and agricultural output dynamics in Indonesia. *Discover Sustainability*, 7(1). <https://doi.org/10.1007/s43621-025-02438-5>
- [18] Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas. (2026). *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP)*. Retrieved from https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Dokumen%202026/IBSAP%20EN%20Package_rev0227.pdf
- [19] Tan, Y. S. (2024). Community Enforcement of Social-Distancing Rules in Indonesia. *National University of Singapore Faculty of Law*. Retrieved from <https://law.nus.edu.sg/impact/community-enforcement-of-social-distancing-rules-in-indonesia/>
- [20] Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic Capabilities and Strategic Management. *Strategic Management Journal*, 18(7), 509–533. [https://doi.org/10.1002/\(SICI\)1097-0266\(199708\)18:7%3C509::AID-SMJ882%3E3.0.CO;2-Z](https://doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(199708)18:7%3C509::AID-SMJ882%3E3.0.CO;2-Z)
- [21] Hutchinson, J. (2024). Dynamic Capabilities (Organizational Theory). *EBSCO Research Starters*.
- [22] Food and Agriculture Organization. (2023). *Indonesia launch national strategy for agriculture digitalization*. Retrieved from <https://www.fao.org/indonesia/news/detail/Indonesia-Launch-National-Strategy-for-Agriculture-Digitalization/en>
- [23] Food and Agriculture Organization. (2026). *VLC voices: From detection to response: Tackling transboundary animal and plant threats*. Retrieved from <https://www.fao.org/animal-health/news-events/news/detail/vlc-voices-from-detection-to-response-tackling-transboundary-animal-and-plant-threats/en>
- [24] Asghar, M. Z., Afzaal, M. N., Iqbal, J., Waqar, Y., & Seitamaa-Hakkarainen, P. (2022). Evaluation of in-service vocational teacher training program: A blend of face-to-face, online and offline learning approaches. *Sustainability*, 14(21), 13906. <https://doi.org/10.3390/su142113906>
- [25] Crabtree, B. (2026). *How Can Local Governments Transform Budget Offices Into Strategic Partners?* Euna Solutions. Retrieved from <https://eunasolutions.com/resources/strategic-budgeting-in-local-government/>
- [26] Soeyanthe, G. A., & Hendayana, H. (2025). *Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Maluku* (Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).
- [27] Hardjati, S., Wahyudi, K. E., & Hidayat, E. (2021). *Buku ajar manajemen strategi sektor publik*. Indomedia Pustaka.
- [28] Atlassian. (2025). Stakeholder Theory: Definition & Framework. Retrieved from <https://www.atlassian.com/work-management/project-collaboration/Stakeholder-theory>
- [29] Teece, D. J. (2007). Explicating Dynamic Capabilities: The Nature and Microfoundations of (Sustainable) Enterprise Performance. *Strategic Management Journal*, 28(13), 1319–1350. <https://doi.org/10.1002/smj.640>
- [30] Perry, J. L., & Wise, L. R. (1990). The Motivational Bases of Public Service. *Public Administration Review*, 50(3), 367–373. <https://doi.org/10.2307/976618>

- [31] Madubun, J. (2024). Public services in island sub-districts: Towards geography-based governance. *Australian Journal of Public Administration*, 83(3), 308-327. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12586>
- [32] Uang, Y., Kaloly, J. H., & Rumasukun, A. (2025). Transformation of Public Services in the Island Regions: Improving Community Participation through Information Technology. *Indigenous Public Administration Proceedings*, 2025, 454-458. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2025.1347>
- [33] Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1992). The Balanced Scorecard: Measures That Drive Performance. *Harvard Business Review*, 70(1), 71-79.
- [34] Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004). *Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes*. Harvard Business School Press.
- [35] Rainey, H. G. (2009). *Understanding and Managing Public Organizations* (4th ed.). Jossey-Bass.
- [36] Sutedi, E., Herdiawan, I., & Handiwirawan, E. (2017). Pulau-pulau kecil terluar Indonesia untuk lokasi karantina dan pengembangan ternak. *Wartazoa*, 27(4), 187-196.